

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara karena mencerminkan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai barang ekonomi yang didukung oleh kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, serta perubahan struktural (Kuznets, 1955).

Sejalan dengan pandangan tersebut, pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai proses kenaikan output nasional yang berlangsung secara berkesinambungan dan menjadi dasar peningkatan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2016). Selain itu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara (Todaro & Smith, 2015).

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak selalu bergerak secara stabil, melainkan dapat mengalami fluktuasi akibat krisis ekonomi, ketidakpastian global, serta berbagai guncangan eksternal lainnya. Dalam konteks perekonomian global, isu pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dipahami sebagai proses

peningkatan produksi barang dan jasa yang berdampak pada peningkatan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2016).

Pada era globalisasi, keterkaitan antarnegara semakin kuat sehingga dinamika ekonomi global dapat dengan cepat memengaruhi kinerja ekonomi suatu negara. Salah satu contoh nyata adalah pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi secara global pada tahun 2020 dan berdampak signifikan terhadap perekonomian berbagai negara, termasuk di kawasan regional. Dampak tersebut tidak hanya terjadi pada masa krisis, tetapi juga memengaruhi proses pemulihan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya.

Sebagai respons terhadap globalisasi dan meningkatnya persaingan ekonomi internasional, terbentuk berbagai kawasan integrasi ekonomi regional. Integrasi ekonomi regional tidak hanya menciptakan keterbukaan pasar melalui pengurangan hambatan perdagangan, tetapi juga mendorong peningkatan arus investasi, mobilitas faktor produksi, serta transfer teknologi antarnegara. Selain itu, kerja sama regional juga berperan dalam menciptakan stabilitas ekonomi melalui koordinasi kebijakan, peningkatan kepercayaan investor, serta penguatan daya saing ekonomi di tingkat global.

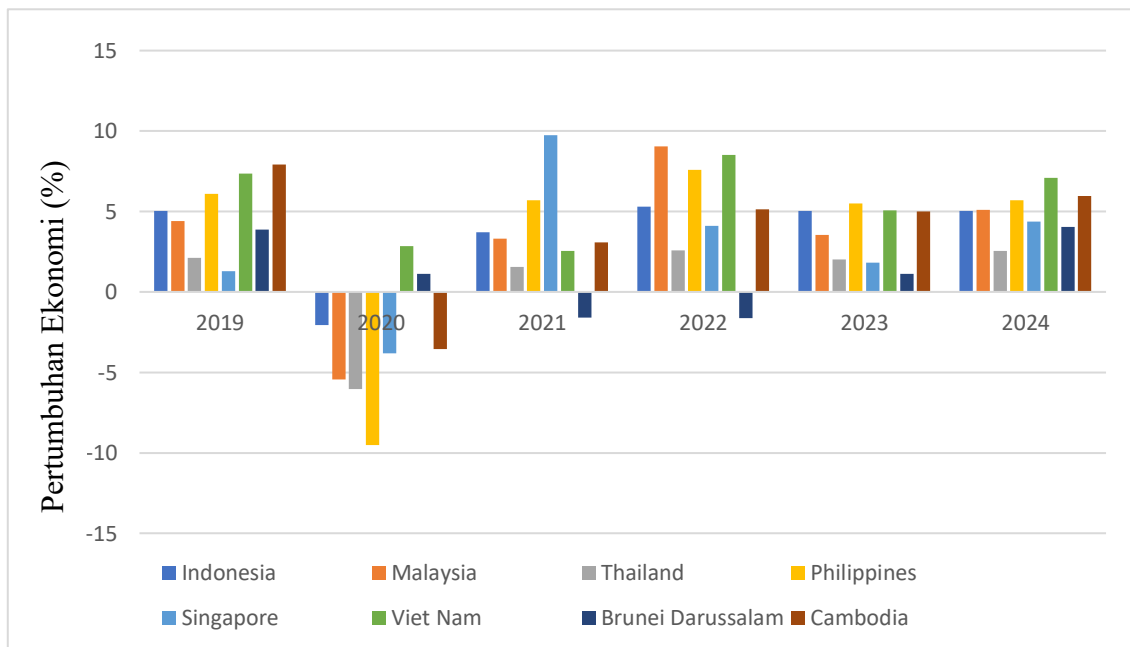
Salah satu kawasan regional yang memiliki peran strategis tersebut adalah *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Kawasan ini terdiri dari negara-negara berkembang dan *emerging economies* dengan tingkat heterogenitas ekonomi yang tinggi, baik dari sisi struktur ekonomi, kapasitas fiskal, maupun kualitas kelembagaan. Selain itu, ASEAN juga memiliki kontribusi yang semakin besar

terhadap perekonomian global, sehingga dinamika pertumbuhan ekonominya menjadi relevan untuk dikaji secara empiris. Secara komparatif, laju pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global. Berdasarkan data *World Bank* dan *International Monetary Fund* (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN pada periode 2020–2024 secara umum menunjukkan pola yang relatif stabil, meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.

Dalam laporan *World Economic Outlook*, *International Monetary Fund* (IMF) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global cenderung melambat akibat ketidakpastian geopolitik, tekanan inflasi global, serta pengetatan kebijakan moneter di negara maju. Namun demikian, negara-negara ASEAN mampu menunjukkan proses pemulihan ekonomi yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata global (Fund, 2023). Sejalan dengan itu, (*World Bank*, 2024) mencatat bahwa kawasan Asia Tenggara tetap menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi dunia karena didukung oleh bonus demografi, integrasi perdagangan regional, serta peran aktif pemerintah dalam mendorong stabilitas ekonomi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di kawasan ini juga bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh kondisi struktural serta kemampuan masing-masing negara dalam menghadapi guncangan global.

Berdasarkan data *World Bank*, laju pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN yang diukur menggunakan *GDP growth (annual %)* selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, hampir seluruh negara ASEAN mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, yang mencerminkan tingginya kerentanan terhadap guncangan eksternal. Memasuki periode 2021–2024, negara-negara ASEAN mulai menunjukkan proses pemulihan ekonomi dengan tingkat dan kecepatan yang berbeda-beda sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Sumber: *WorldBank (2024)* , *World Development Indicators*, data diolah penulis (2026)

Gambar 1.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi ASEAN-8 Tahun 2019 – 2024 (%)

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN selama periode 2019–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun

2020, hampir seluruh negara mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Philippines mencatat kontraksi terdalam sebesar -9,51%, diikuti oleh Thailand sebesar -6,05% dan Malaysia sebesar -5,45%, sementara Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,06%. Namun demikian, Viet Nam masih mampu mencatat pertumbuhan positif sebesar 2,86%, diikuti oleh Brunei Darussalam sebesar 1,13%, yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat ketahanan ekonomi antarnegara.

Memasuki periode 2021–2022, sebagian besar negara ASEAN menunjukkan pemulihan ekonomi yang cukup signifikan. Singapore mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 9,75% pada tahun 2021, sementara Malaysia dan Philippines masing-masing tumbuh sebesar 9,03% dan 7,58% pada tahun 2022. Namun demikian, tidak semua negara mengalami pemulihan yang stabil, seperti Brunei Darussalam yang kembali mengalami kontraksi pada tahun 2021 dan 2022, serta Thailand yang menunjukkan pertumbuhan relatif rendah.

Pada periode 2023–2024, pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN cenderung mulai stabil, meskipun masih terdapat perbedaan antarnegara. Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil di kisaran 5%, sementara Viet Nam tetap menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 7,09% pada tahun 2024. Di sisi lain, Thailand masih mencatat pertumbuhan yang relatif lebih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Perbedaan pola pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan masing-masing negara dalam menghadapi krisis dan mendorong pemulihan ekonomi tidaklah sama. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat berbagai faktor yang

memengaruhi pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN, baik yang berasal dari kondisi internal masing-masing negara maupun faktor eksternal global. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN.

Perbedaan kecepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi tersebut mengindikasikan adanya perbedaan respons kebijakan ekonomi di masing-masing negara ASEAN. Salah satu instrumen kebijakan yang berperan penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan ekonomi adalah kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah, khususnya yang digunakan untuk konsumsi dan penyediaan layanan publik, berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan permintaan barang dan jasa serta mendukung produktivitas masyarakat (Keynes, 1936).

Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah untuk konsumsi akhir merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan permintaan barang dan jasa. Peningkatan pengeluaran pemerintah berpotensi meningkatkan output dan pendapatan nasional sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2016). Selain itu, pengeluaran pemerintah juga berperan dalam penyediaan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan, yang mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat (Musgrave & Musgrave, 1989).

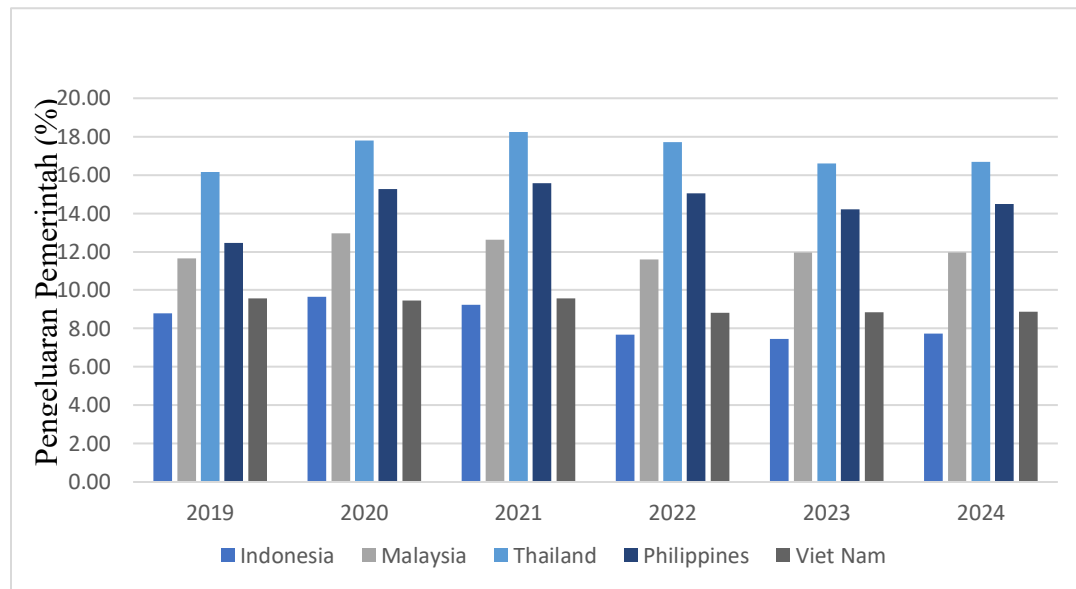
Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen fiskal yang dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui peningkatan permintaan barang dan jasa.

Peningkatan pengeluaran pemerintah dapat menimbulkan efek pengganda (*multiplier effect*) yang mendorong peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Melalui penyediaan layanan publik dan aktivitas pemerintahan, pengeluaran pemerintah mencerminkan peran aktif negara dalam menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi (Samuelson & D, 2010). Dalam penelitian ini, pengeluaran pemerintah diukur menggunakan indikator *General Government Final Consumption Expenditure* (% of GDP) yang diterbitkan oleh *World Bank*. Indikator ini menggambarkan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah yang meliputi belanja untuk penyediaan barang dan jasa publik, termasuk kompensasi pegawai, pembelian barang dan jasa, serta pengeluaran operasional pemerintah yang dinyatakan sebagai persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Penggunaan indikator ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peran konsumsi pemerintah dalam aktivitas perekonomian dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam kondisi perlambatan ekonomi atau krisis, kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah berfungsi sebagai stimulus fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mempercepat proses pemulihan (Blanchard, 2017). Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah kerap dijadikan sebagai instrumen utama dalam meredam dampak krisis dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap perekonomian, penelitian ini menyajikan grafik *General Government Final Consumption Expenditure* (% of GDP) pada beberapa negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, dan Viet Nam selama

periode 2019–2024. Pemilihan negara dilakukan secara *purposive* untuk mewakili karakteristik tingkat pengeluaran pemerintah yang berbeda di kawasan ASEAN sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2.



Sumber: *WorldBank* (2024), *World Development Indicators*, data diolah penulis (2026)

Gambar 1.2

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terhadap PDB pada Negara-Negara ASEAN Tahun 2019–2024 (%)

Berdasarkan grafik *General Government Final Consumption Expenditure (% of GDP)* pada beberapa negara ASEAN selama periode 2019–2024, terlihat adanya perbedaan tingkat dan pola pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDB antarnegara. Secara umum, proporsi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDB cenderung meningkat pada awal periode sebagai respons kebijakan fiskal dalam menghadapi pandemi COVID-19, kemudian mengalami penyesuaian pada tahun-tahun berikutnya.

Thailand merupakan negara dengan proporsi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDB tertinggi dibandingkan negara lainnya, yaitu sebesar 16,16% pada tahun 2019, meningkat menjadi 17,79% pada tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 18,23% pada tahun 2021. Meskipun mengalami penurunan pada periode berikutnya, nilai *General Government Final Consumption Expenditure* Thailand tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi hingga tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan besarnya peran konsumsi pemerintah dalam perekonomian Thailand selama periode pengamatan.

Philippines juga menunjukkan proporsi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDB yang relatif tinggi, yaitu sebesar 6,11% pada tahun 2019, kemudian meningkat menjadi 15,26% pada tahun 2020 dan 15,57% pada tahun 2021 sebelum mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 14,50% pada tahun 2024. Pola tersebut mengindikasikan adanya peningkatan peran konsumsi pemerintah selama masa pandemi yang kemudian diikuti oleh proses normalisasi.

Sementara itu, Malaysia memiliki proporsi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDB yang relatif stabil pada kisaran 11%–12% sepanjang periode pengamatan. Di sisi lain, Indonesia menunjukkan nilai sebesar 8,80% pada tahun 2019, meningkat menjadi 9,65% pada tahun 2020, kemudian mengalami tren penurunan hingga sekitar 7,45% pada tahun 2023 sebelum sedikit meningkat menjadi 7,73% pada tahun 2024. Penurunan tersebut mengindikasikan berkurangnya proporsi konsumsi pemerintah terhadap aktivitas perekonomian setelah periode stimulus pandemi.

Adapun Viet Nam memiliki proporsi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDB yang relatif lebih rendah dibandingkan negara lainnya, yaitu berada pada

kisaran 8%–9% selama periode 2019–2024. Meskipun demikian, pola yang relatif stabil menunjukkan konsistensi peran konsumsi pemerintah dalam perekonomian negara tersebut.

Perbedaan tingkat dan pola *General Government Final Consumption Expenditure (% of GDP)* antarnegara menunjukkan bahwa kontribusi konsumsi pemerintah terhadap perekonomian tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kebijakan masing-masing negara. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat berbeda-beda antarnegara. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN-8.

Selain kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah, faktor lain yang tidak kalah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Dalam teori pertumbuhan ekonomi, investasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas produksi, akumulasi modal, serta mendorong pertumbuhan jangka panjang suatu negara. Investasi tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dapat bersumber dari luar negeri dalam bentuk penanaman modal asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI).

Secara teoritis, *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian terbuka yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara berkembang. FDI berperan dalam meningkatkan investasi domestik, menciptakan lapangan kerja, serta

mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan manajerial. Selain itu, FDI juga dapat meningkatkan produktivitas melalui *spillover effect* yang terjadi antara perusahaan asing dan domestik (Todaro & Smith, 2015).

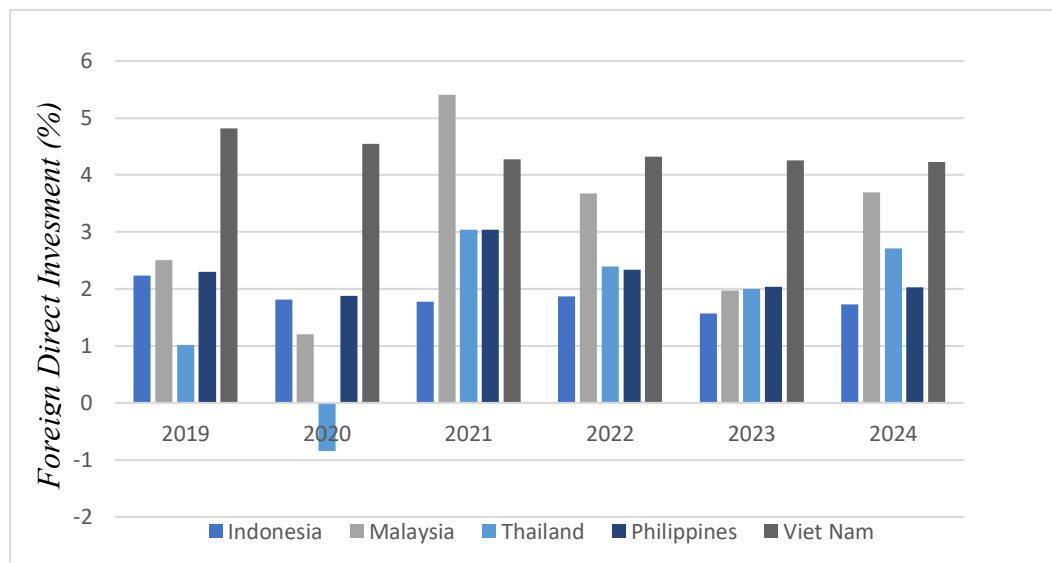
Dalam kerangka teori pertumbuhan neoklasik, investasi asing dipandang sebagai salah satu sumber tambahan modal yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara yang mengalami keterbatasan tabungan domestik (Solow, 1956). Sementara itu, dalam teori pertumbuhan endogen, FDI tidak hanya berperan sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai sarana transfer teknologi yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan inovasi (Romer, 1986).

Lebih lanjut, investasi, termasuk FDI, merupakan salah satu determinan utama dalam pertumbuhan ekonomi karena berkontribusi terhadap peningkatan stok modal dan produktivitas (Mankiw, 2016). Selain itu, dalam jangka pendek, peningkatan investasi dapat mendorong permintaan agregat, sedangkan dalam jangka panjang berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi perekonomian (Blanchard, 2017).

Namun demikian, pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat positif. Kontribusi FDI terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kondisi domestik suatu negara, terutama tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, faktor kelembagaan, stabilitas ekonomi, serta kualitas tata kelola pemerintahan juga menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas FDI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Eduardo et al., 1998).

Dengan demikian, FDI tidak hanya berperan sebagai sumber pembiayaan eksternal, tetapi juga sebagai katalis dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena

itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan ASEAN yang memiliki karakteristik negara berkembang dengan tingkat keterbukaan ekonomi yang relatif tinggi. Untuk memberikan gambaran empiris mengenai perkembangan investasi asing di kawasan ASEAN, penelitian ini menyajikan grafik *Foreign Direct Investment* (FDI) pada beberapa negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, dan Viet Nam selama periode 2020–2024.



Sumber: *WorldBank* (2024), *World Development Indicators*, data diolah penulis (2026)

Gambar 1.3

Perkembangan *Foreign Direct Investment* ASEAN-8 Tahun 2019 – 2024 (%)

Berdasarkan Gambar 1.3, terlihat bahwa perkembangan *Foreign Direct Investment* (FDI) pada negara-negara ASEAN selama periode 2019–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan tingkat yang berbeda-beda antarnegara. Malaysia menunjukkan fluktuasi FDI yang cukup signifikan, di mana terjadi lonjakan

yang sangat tinggi pada tahun 2021 sebesar 5,41% dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 1,20%. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 3,68% dan kembali turun pada tahun 2023 sebesar 1,97%, FDI Malaysia kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 3,69%. Hal ini menunjukkan adanya dinamika arus investasi yang cukup sensitif terhadap kondisi ekonomi global maupun domestik.

Sementara itu, Viet Nam menunjukkan tingkat FDI yang relatif stabil dan konsisten tinggi dibandingkan negara lainnya, yaitu berada pada kisaran 4,23% hingga 4,55% selama periode pengamatan. Stabilitas ini mencerminkan daya tarik investasi yang kuat serta kepercayaan investor yang relatif terjaga.

Di sisi lain, Philippines mengalami penurunan pada tahun 2019 dari 2,30% menjadi 1,88% pada tahun 2020 lalu mengalami peningkatan menjadi 3,04% pada tahun 2021, kemudian cenderung menurun dan stabil pada kisaran 2% hingga tahun 2024. Pola ini menunjukkan adanya proses normalisasi arus investasi setelah periode pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Indonesia menunjukkan tingkat FDI yang relatif rendah dan stabil, yaitu berkisar antara 1,87% hingga 2,23% selama periode 2019–2024. Meskipun tidak mengalami fluktuasi yang besar, kondisi ini menunjukkan bahwa arus investasi asing di Indonesia cenderung stabil namun belum mengalami peningkatan yang signifikan.

Berbeda dengan negara lainnya, Thailand mengalami kontraksi FDI pada tahun 2020 sebesar -0,85%, yang kemudian meningkat secara signifikan menjadi 3,04% pada tahun 2021. Namun, pada tahun-tahun berikutnya FDI Thailand cenderung mengalami

penurunan dan berada pada kisaran 2% hingga 2,71% hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan yang cukup cepat, namun belum sepenuhnya stabil.

Secara keseluruhan, perbedaan tingkat dan pola FDI antarnegara tersebut menunjukkan bahwa daya tarik investasi asing di kawasan ASEAN tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stabilitas ekonomi, kebijakan pemerintah, serta kondisi kelembagaan di masing-masing negara. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana peran FDI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.

Selain faktor ekonomi seperti pengeluaran pemerintah dan investasi, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, salah satunya adalah tingkat korupsi. Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama yang dapat menghambat pembangunan ekonomi karena menyebabkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya serta menurunkan efektivitas kebijakan publik. Oleh karena itu, pengendalian korupsi (*Control of Corruption*) menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

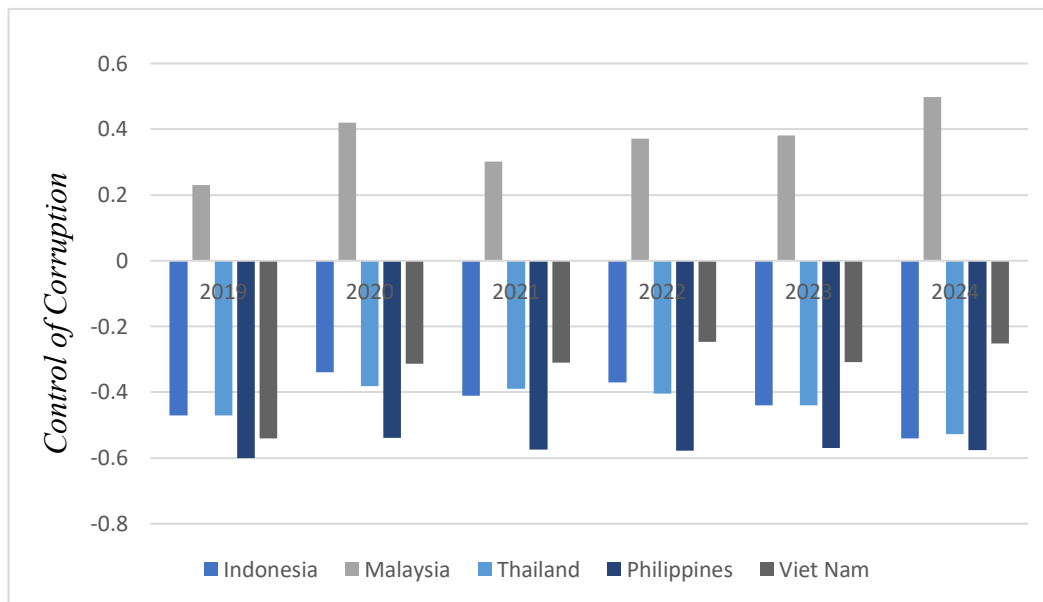
Secara konseptual, *Control of Corruption* (CC) mencerminkan sejauh mana kekuasaan publik digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk praktik korupsi kecil maupun besar, serta sejauh mana negara mampu mengendalikan tindakan tersebut (Kaufmann et al., 2010). Tingkat korupsi yang tinggi dapat meningkatkan biaya transaksi, mengurangi efisiensi investasi, serta menurunkan kepercayaan investor terhadap perekonomian suatu negara (Mauro & 1995, n.d.).

Dalam perspektif ekonomi, korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme. Korupsi dapat mengurangi kualitas belanja pemerintah, menghambat investasi, serta menciptakan distorsi dalam pasar yang menyebabkan alokasi sumber daya menjadi tidak optimal (Shleifer & Vishny, 1993). Selain itu, korupsi juga dapat menurunkan penerimaan negara serta menghambat pelaksanaan kebijakan pembangunan secara efektif (Tanzi & Davoodi, 1997).

Lebih lanjut, tingkat pengendalian korupsi yang baik diyakini dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara dengan tingkat korupsi yang rendah cenderung memiliki iklim investasi yang lebih kondusif, tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, serta kualitas institusi yang lebih baik (North, 1990). Oleh karena itu, *Control of Corruption* menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja ekonomi suatu negara.

Dalam konteks negara berkembang, termasuk kawasan ASEAN, tingkat korupsi masih menjadi tantangan yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perbedaan tingkat pengendalian korupsi antarnegara menunjukkan adanya variasi dalam kualitas kelembagaan yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan ekonomi dan kinerja pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pengaruh *Control of Corruption* terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN.

Untuk memberikan gambaran empiris mengenai kondisi pengendalian korupsi, penelitian ini menyajikan grafik *Control of Corruption* pada beberapa negara ASEAN selama periode 2019–2024.



Sumber: WorldBank (2024), *World Governance Indicators*, data diolah penulis (2026)

Gambar 1.4

Perkembangan *Control of Corruption* ASEAN-8 Tahun 2019 – 2024 (%)

Berdasarkan Gambar 1.4, terlihat bahwa perkembangan *Control of Corruption* (CC) di negara-negara ASEAN selama periode 2019–2024 menunjukkan perbedaan tingkat yang cukup signifikan antarnegara, dengan sebagian besar negara masih berada pada nilai negatif yang mengindikasikan tingkat pengendalian korupsi yang relatif rendah. Malaysia merupakan negara dengan tingkat *Control of Corruption* tertinggi di antara negara yang diamati, dengan nilai positif yang berkisar antara 0,30 hingga 0,50 selama periode pengamatan. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021, nilai CC Malaysia menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai 0,50 pada tahun

2024. Hal ini mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang relatif lebih baik dibandingkan negara lainnya.

Sementara itu, Viet Nam menunjukkan nilai CC yang relatif stabil meskipun masih berada pada kisaran negatif, yaitu antara -0,31 hingga -0,25. Stabilitas ini mengindikasikan adanya upaya pengendalian korupsi yang cukup konsisten, meskipun belum mencapai tingkat yang optimal. Di sisi lain, Indonesia mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, dari -0,34 pada tahun 2020 menjadi -0,54 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian korupsi masih menghadapi tantangan dalam beberapa tahun terakhir.

Thailand juga menunjukkan tren yang cenderung menurun, dari -0,38 pada tahun 2020 menjadi -0,53 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya pelemahan dalam kualitas pengendalian korupsi yang berpotensi memengaruhi kepercayaan investor dan efisiensi ekonomi. Adapun Philippines memiliki nilai CC terendah di antara negara yang diamati, dengan kisaran antara -0,60 hingga -0,58 selama periode 2019–2024. Nilai yang relatif stagnan ini menunjukkan bahwa tingkat pengendalian korupsi masih menjadi tantangan yang cukup serius.

Secara keseluruhan, perbedaan tingkat *Control of Corruption* antarnegara ASEAN menunjukkan adanya variasi dalam kualitas tata kelola pemerintahan. Negara dengan tingkat pengendalian korupsi yang lebih baik cenderung memiliki lingkungan ekonomi yang lebih kondusif, sementara negara dengan tingkat korupsi yang tinggi berpotensi mengalami hambatan dalam menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut peran

Control of Corruption dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN.

Selain faktor ekonomi dan kelembagaan seperti pengeluaran pemerintah, investasi asing, serta pengendalian korupsi, kualitas tata kelola pemerintahan (*Good Governance*) juga memiliki peran penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi. *Good Governance* mencerminkan bagaimana pemerintah menjalankan fungsi dan kewenangannya secara efektif, transparan, dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik.

Secara konseptual, kualitas tata kelola pemerintahan dapat diukur melalui indikator *Government Effectiveness* (GE), yang mencerminkan persepsi terhadap kualitas pelayanan publik, kapasitas birokrasi, independensi aparatur pemerintah, serta kredibilitas kebijakan yang dihasilkan (Kaufmann et al., 2010). Tingginya tingkat efektivitas pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil mampu diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian.

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kualitas institusi merupakan faktor fundamental yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Institusi yang kuat dan efektif mampu menciptakan stabilitas, mengurangi ketidakpastian, serta meningkatkan kepercayaan investor, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi (North, 1990). Selain itu, kualitas tata kelola pemerintahan juga berperan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta efektivitas kebijakan fiskal (Rodrik et al., 2004).

Lebih lanjut, *Good Governance* tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel lain seperti pengeluaran pemerintah, investasi asing, dan pengendalian korupsi. Dalam hal ini, kualitas tata kelola pemerintahan berperan sebagai variabel moderasi yang menentukan seberapa efektif kebijakan ekonomi dan arus investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara dengan kualitas tata kelola yang baik cenderung mampu memaksimalkan manfaat dari pengeluaran pemerintah dan *Foreign Direct Investment* (FDI), serta meminimalkan dampak negatif dari korupsi.

Dengan demikian, *Government Effectiveness* sebagai bagian dari indikator *Good Governance* menjadi variabel yang penting untuk dikaji dalam penelitian ini, khususnya dalam perannya sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara pengeluaran pemerintah, FDI, dan *Control of Corruption* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.

Efektivitas kebijakan ekonomi sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan. Kebijakan ekonomi akan memberikan hasil yang optimal apabila didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Acemoglu & Robinson, 2019). Konsep *good governance* yang diperkenalkan oleh *World Bank* menekankan pentingnya akuntabilitas, stabilitas politik, serta pengendalian korupsi dalam pengelolaan kebijakan publik.

Kualitas tata kelola pemerintahan dapat diukur melalui indikator *Government Effectiveness*, yang mencerminkan kualitas pelayanan publik, kapasitas birokrasi, serta

efektivitas implementasi kebijakan. Kualitas ini menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan ekonomi, termasuk dalam pengelolaan pengeluaran pemerintah, penarikan investasi asing, serta pengendalian korupsi (Kaufmann et al., 2010).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara variabel ekonomi dan kelembagaan terhadap pertumbuhan ekonomi. FDI, *Control of Corruption*, dan *Government Effectiveness* terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN, namun tanpa memasukkan variabel pengeluaran pemerintah serta tanpa menggunakan variabel moderasi (Hanan & Prastowo, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Foreign Direct Investment* (FDI) dan pengeluaran pemerintah merupakan faktor yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. FDI dan pengeluaran pemerintah terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN (Ardiana & Widanta, 2025). Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada faktor ekonomi makro dan belum mengintegrasikan aspek kualitas kelembagaan dalam model penelitian. Di sisi lain, indikator tata kelola pemerintahan seperti *Government Effectiveness* dan *Control of Corruption* terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Addainuri et al., 2023; Prasetyani, D.; Cahyadin, M.; Wei, Y. S.; Rosalia, 2023; Raharja, J.; Purnomo, E. P.; Mutiarin, 2023; Ramadhan, 2019a). Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek kelembagaan dan belum mengintegrasikan variabel ekonomi

seperti *Foreign Direct Investment* (FDI) dan pengeluaran pemerintah dalam satu model penelitian.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa *Foreign Direct Investment* (FDI) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Addainuri et al., 2023; I.W & Renaldi I, 2024; Kharisma, 2024; Marasanti & Verico, 2023; Saputra & Al., 2021; Sari & Choiri, n.d.). Namun demikian, penelitian tersebut umumnya lebih menekankan faktor investasi dan belum mempertimbangkan secara komprehensif peran kualitas tata kelola pemerintahan dalam memengaruhi hubungan antara FDI dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, *Government Effectiveness* juga terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memperkuat hubungan antarvariabel dalam model penelitian (Basri, 2025; Tazkia, 2025). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara simultan keterkaitan antara pengeluaran pemerintah, *Foreign Direct Investment* (FDI), *Control of Corruption*, dan *Government Effectiveness* terhadap pertumbuhan ekonomi dalam satu model penelitian yang terintegrasi.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada pengaruh langsung variabel pengeluaran pemerintah, FDI, dan *Control of Corruption* terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial. Selain itu, penelitian yang mengkaji aspek tata kelola pemerintahan umumnya hanya menempatkan *Government Effectiveness* sebagai

variabel independen, bukan sebagai variabel yang berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antarvariabel ekonomi.

Di sisi lain, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan secara simultan variabel pengeluaran pemerintah, FDI, dan *Control of Corruption* dalam satu model penelitian yang komprehensif. Selain itu, penelitian yang secara khusus menguji peran *Government Effectiveness* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara variabel-variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi juga masih sangat terbatas, khususnya pada konteks negara-negara ASEAN.

Lebih lanjut, sebagian besar penelitian terdahulu belum mempertimbangkan periode krisis dan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, yang berpotensi memengaruhi efektivitas kebijakan ekonomi serta hubungan antarvariabel yang diteliti. Padahal, periode 2020–2024 merupakan periode yang penting karena mencerminkan dinamika ekonomi yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya.

Dengan demikian, kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, FDI, dan *Control of Corruption* terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memasukkan *Government Effectiveness* sebagai variabel moderasi, khususnya pada negara-negara ASEAN selama periode 2019–2024. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, FDI, dan *Control of Corruption* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN-8 dengan *Government Effectiveness* sebagai variabel moderasi selama periode tersebut..

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan *Control of Corruption* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN-8 periode 2019 – 2024.
2. Bagaimana *Government Effectiveness* memoderasi pengaruh pengeluaran pemerintah, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan *Control of Corruption* terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-8 periode 2019 – 2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan *Control of Corruption* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN-8 periode 2019 – 2024.
2. Peran *Government Effectiveness* dalam memoderasi pengaruh Pengeluaran Pemerintah, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan *Control of Corruption* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN-8 periode 2019 – 2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk berbagai pihak, diantaranya

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi makro. Kontribusi tersebut terletak pada pengembangan model analisis yang mengkaji pertumbuhan ekonomi tidak hanya dari sisi variabel makroekonomi, seperti Pengeluaran Pemerintah dan *Foreign Direct Investment* (FDI), tetapi juga dengan memasukkan aspek kelembagaan secara lebih mendalam, yaitu melalui variabel *Control of Corruption* dan *Government Effectiveness*.

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang umumnya menempatkan variabel kelembagaan sebagai faktor yang berdiri sendiri, penelitian ini mengkaji peran *Government Effectiveness* dalam mempengaruhi hubungan antara variabel ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih luas bahwa keberhasilan kebijakan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya intervensi ekonomi, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dikelola dan diimplementasikan.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengembangan dalam pendekatan analisis dengan menggunakan model regresi data panel yang dikombinasikan dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA), sehingga mampu menangkap interaksi antar variabel secara lebih komprehensif. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam konteks negara-negara ASEAN yang memiliki karakteristik ekonomi dan kelembagaan yang beragam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya

perspektif analisis pertumbuhan ekonomi dengan menekankan keterkaitan antara faktor ekonomi dan kualitas institusi dalam satu kerangka yang terintegrasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif, khususnya dalam mengoptimalkan pengeluaran pemerintah, menarik investasi asing (FDI), serta memperkuat pengendalian korupsi. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan (*Government Effectiveness*) sebagai faktor yang dapat memperkuat dampak kebijakan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kuantitas belanja dan investasi, tetapi juga pada kualitas institusi dan efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh variabel makroekonomi, kualitas institusi, serta peran variabel moderasi dalam analisis pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk melakukan pengembangan model analisis yang lebih kompleks dan komprehensif di masa yang akan datang.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Bagian ini menjelaskan mengenai tempat dilaksanakannya penelitian serta rentang waktu yang digunakan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian penting untuk memberikan kejelasan konteks penelitian serta memastikan keterbatasan ruang lingkup penelitian dapat dipahami secara sistematis.

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya. Pemilihan Universitas Siliwangi sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa seluruh kegiatan penelitian, mulai dari pengumpulan data sekunder, pengolahan data, hingga analisis dan penyusunan laporan penelitian, dilakukan di lingkungan Universitas Siliwangi.

Meskipun demikian, objek penelitian ini adalah negara – negara yang tergabung dalam *Associaton of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi, yaitu WorldBank khususnya *World Development Indicators* (WDI) dan *Worldwide Governance Indicators* (WGI). Dengan demikian, lokasi penelitian merujuk paada tempat pelaksanaan kegiatan penelitian, sedangkan objek penelitian mencakup negara – negara ASEAN-8 selama periode 2019 – 2024.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan untuk dilaksanakan selama sebelas bulan, terhitung mulai bulan September 2025 sampai dengan Juli 2026.